



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

Jln. Ferry, Malaweji, kec. Sorong Manoi
Kota Sorong-Papua Barat Daya, 98412

Telepon : (0951)3176788
Fax : (0951)3176788

Email : bptd-sorong@dephub-go.id
bptdpapuarat@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

NOMOR : SK-BPTD.PABAR 8 TAHUN 2026

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025-2029**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025-2029**
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
- KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran Kinerja yang berbasis hasil/*output* yang digunakan oleh masing-masing Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat untuk menetapkan:
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

- KETIGA : Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
- KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua Puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
- KEENAM : Hasil penyusunan rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Capaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan, Kepala Seksi Prasarana Jalan SDP, Kepala Seksi Sarana & Angkutan Jalan SDP, dan Penyeberangan Perintis dan Komersil sebagai berikut:
- a. Melakukan pembinaan dalam rangka Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. Melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



EDY PURWANTO
NIP. 19841217 200912 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
 KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
 KELAS II PAPUA BARAT**

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.1.2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.2 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	23	23	23	31	31
SK 1.2 Meningkatkan konektivitas transportasi angkutan sungai, danau dan Penyeberangan	IKK 1.2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK	Lintasan	5	5	5	5	5
	IKK 1.2.2 Jumlah Pembangunan Pelabuhan ASDP untuk mendukung konektivitas	Unit	-	1	-	-	-
SK 2.1 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalani	IKK 2.1.9 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	18	18	18	18	18
SK 2.2 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	4	4	4	4	4
	IKK 2.2.4 Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP	Kegiatan	1	1	1	1	1
SK 3.1 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1 Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Penumpang	Kegiatan	2	2	2	2	2
	IKK 3.1.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	1	1	1	1	1

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	1	1	1	1	1
		IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	3	3	3	3	3
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Provinsi	2	2	2	2	2
		IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Provinsi	2	2	2	2	2
SK 3.4	Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan	IKK3.4.1	Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Kegiatan	1	1	1	1	1
		IKK3.4.2	Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Kegiatan	1	1	1	1	1
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Propinsi Papua Barat	Kegiatan	5	5	4	4	4
		IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Nilai	85	85	85	85	85
		IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	98	98	98	98	98

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	(penyerapan anggaran)						
IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	%	100	100	100	100	100
IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	%	100	100	100	100	100
IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Kegiatan	1	1	1	1	1
IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	%	100	100	100	100	100
IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	1	1	1
IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	80	80	80
IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4	4	4	4	4



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat

EDY PURWANTO
NIP. 19841217 200912 1 002

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1.1.2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.2	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	
DEFINISI				
Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan adalah Jumlah layanan angkutan jalan yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah Provinsi Papua Barat yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Trayek Subsidi Angkutan Perintis Jalan serta ditetapkan dalam DIPA BPTD Kelas II Papua Barat Dihitung berdasarkan Jumlah realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Suangai Danau dan Penyeberangan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 1.1.2 = \sum \text{realisasi Trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran}$				
SATUAN				
Trayek				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
23	23	31	31	31
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat				
Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Suangai Danau dan Penyeberangan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1.2	Meningkatnya Konektivitas transportasi angkutan sungai, danau dan Penyeberangan	IKK1.2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK	
DEFINISI				
Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP adalah Jumlah layanan angkutan ASDP yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah yang anggaran berada pada BPTD/UPT				
Dihitung berdasarkan Jumlah trayek layanan subsidi transportasi ASDP dalam satu tahun anggaran				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Suangai Danau dan Penyeberangan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 1.2.1 = \sum \text{realisasi Jumlah layanan subsidi transportasi ASDP dalam satu tahun anggaran}$				
SATUAN				
Lintasan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Suangai Danau dan Penyeberangan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1.2	Meningkatnya Konektivitas transportasi angkutan sungai, danau dan Penyeberangan	IKK1.2.2	Jumlah Pembangunan Pelabuhan ASDP untuk mendukung konektivitas	
DEFINISI				
Jumlah Pelabuhan ASDP yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalah yang dibangun dan di operasikan sebagai jembatan vital menghubungkan jaringan jalan atau rel yang terpisah air demi mobilitas dan logistik antar wilayah atau pulau				
Jumlah Pelabuhan ASDP yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri dengan anggaran yang berada pada BPTD/UPT.				
a. Nilai 1 : selesai dibangun dan beroperasi (100%)				
b. Nilai 0,5 : belum beroperasi dan mengikuti nilai realisasi fisik (Cth : 50%)				
c. Nilai lainnya mengikuti fisik pekerjaan				
SUMBER DATA				
- Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat - Seksi Prasarana Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 1.2.2 = \sum \text{realisasi Jumlah Pembangunan Pelabuhan ASDP untuk mendukung konektivitas dalam satu tahun anggaran}$				
SATUAN				
Lintasan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
-	1	-	-	-
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat				
Seksi Prasarana Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.9	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	
DEFINISI				
Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ adalah Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi diluat kegiatan pengawasan keselamatan dan dukungan manajemen. Adapun jenis monitoring dan evaluasi dimaksud adalah sebagai berikut:				
1. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja 2. Pengelolaan urusan keuangan dan PNPB serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi 3. Pengelolaan Bidang Hukum Humas dan Umum 4. Pengelolaan SDM dan Ketatausahaan 5. Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala 6. Monitoring trayek AKAP dan layanan angkutan jalan 7. Manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan sistem informasi manajemen lalu lintas 8. Monitoring dan Pemantauan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru 9. Pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol 10. Monitoring tarif angkutan jalan 11. Persetujuan teknis andalalin 12. Penegakkan hukum bidang LLAJ 13. Pengawasan Bidang LLAJ 14. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan				
Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ dihitung dari Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LLAJ, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Suangai Danau dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
IKK 2.1.2 = $\sum$ realisasi kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ pada tahun berjalan				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
18	18	18	18	18
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah				
Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Suangai Danau dan Penyeberangan				
Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan				
Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM
DEFINISI			
Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan			
Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM dihitung dari Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT			

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP		IKK 2.2.4	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP	
DEFINISI					
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi diluar kegiatan pengawasan keselamatan dan dukungan manajemen					
Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP dihitung dari Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASDP, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT					
SUMBER DATA					
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat - Seksi Prasarana Jalan					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 2.2.4 = \sum \frac{realisasi\ jumlah\ kegiatan\ monitoring\ Evaluasi\ terkait\ peningkatan\ pelaksanaan\ Tugas\ pokok\ dan\ Fungsi\ LLASDP}{\hspace{1cm}}$					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Seksi Prasarana Jalan					

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.1	Meningkatkan keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Penumpang	
DEFINISI				
Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan, baik bagi penumpang meliputi Ram Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan				
Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Penumpang dihitung dari Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan, baik bagi penumpang meliputi Ram Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT				
SUMBER DATA				
- Direktorat Lalu Lintas Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat - Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP				
CARA MENGHITUNG				
IKK 3.1.1 = Realisasi Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Penumpang dalam satu tahun				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
-	2	2	2	2
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Seksi Lalu Lintas Jalan SDP				

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 3.1	Meningkatkan keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Barang		
DEFINISI					
Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Barang adalah Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan bagi muatan barang dan pengguna lainnya meliputi Ram Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan. Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Barang dihitung dari Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan bagi muatan barang dan pengguna lainnya meliputi Ram Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Lalu Lintas Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat - Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP					
CARA MENGHITUNG					
IKK 3.1.2 = Realisasi Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Barang					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Seksi Lalu Lintas Jalan SDP					

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.2	Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	
DEFINISI				
Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Karoseri adalah surat izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa rancangan bangun fisik kendaraan yang akan dibuat atau dimodifikasi oleh perusahaan karoseri telah memenuhi persyaratan keselamatan dan layak jalan. SKRB Karoseri diterbitkan untuk kendaraan bermotor yang telah dilakukan modifikasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh perusahaan karoseri. Modifikasi yang dilakukan dapat berupa perubahan bentuk, ukuran, kapasitas, maupun fungsi kendaraan. Kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan oleh BPTD adalah proses verifikasi desain dan konstruksi kendaraan hasil modifikasi atau karoseri untuk memastikan kesesuaian standar teknis, keselamatan, dan laik jalan dengan ketentuan SKRB yang dimiliki sebelum diproduksi massal atau digunakan di jalan. Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman adalah Jumlah pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan yang terlaksana sesuai jumlah permohonan yang masuk.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat - Seksi Sarana angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 3.2.1 = \sum \text{realisasi Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman dalam satu Tahun}$				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
-	1	1	1	1
PENANGGU JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat				
Seksi Sarana angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan				
CATATAN				

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.2	Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety		IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	
DEFINISI					
Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar. Kalibrasi dilaksanakan setahun sekali untuk setiap UPUPKB. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan alat uji, sehingga dapat memberikan hasil yang tepat dalam pemeriksaan kendaraan. Bahwa kalibrasi merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan berkendara. dengan melakukan kalibrasi secara rutin dapat memastikan bahwa alat-alat uji yang digunakan memberikan hasil yang akurat. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD					
SUMBER DATA					
• Direktorat Sarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat • Seksi Sarana Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 2.2.1 = \sum \text{Realisasi Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB}$					
SATUAN					
Unit					
TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	3	
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Seksi Sarana Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan		IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	
DEFINISI					
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi : 1) Alat Penerangan Jalan; 2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system; 3) Marka Jalan; 4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan; 5) Paku Jalan; 6) Rambu Lalu Lintas; 7) Rambu Tiang Gawang; 8) Rambu Tiang F; 9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan; 10) Pagar Pengaman Jalan; Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tnis Perlengkapan Jalan					
SUMBER DATA					
• Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat • Seksi Lalu Lintas Jalan SDP					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 3.3.1 = \sum Realisasi\ Jumlah\ Perlengkapan\ Jalan\ Terpasang\ sesuai\ Spesifikasi\ Teknis$					
SATUAN					
Unit					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	7.934	24.700	6.168	9.501	6.287
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Seksi Lalu Lintas Jalan SDP					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman		
DEFINISI					
Jumlah lokasi LRK yang lakukan intervensi penanganan sesuai pedoman adalah jumlah ruas jalan atau titik spesifik yang sebelumnya teridentifikasi memiliki angka kecelakaan tinggi (berulang) berdasarkan data kepolisian, yang kini telah mendapatkan penanganan teknis (perbaikan geometri, fasilitas perlengkapan jalan, atau manajemen lalu lintas) sesuai standar teknis untuk menurunkan atau menghilangkan risiko kecelakaan. Jumlah LRK yang terdapat dalam Studi SID yang telah di intervensi dengan kebijakan pencegahan termasuk pemasangan perlengkapan jalan dll. yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat - Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan SDPP					
CARA MENGHITUNG					
IKK 3.3.2 = ∑ Realisasi Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman					
SATUAN					
Lokasi					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	25	25	25	25	25
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat					
Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan SDPP					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 3.4	Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan	IKK 3.4.1	Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ		
DEFINISI					
Kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ adalah Serangkaian upaya komunikasi, edukasi, dan sosialisasi yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, serta perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dan menggunakan angkutan jalan yang aman, tertib, dan berkeselamatan					
SUMBER DATA					
- Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan penyeberangan					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 3.4.1 = \sum \text{Realisasi Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ}$					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat					
Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan penyeberangan					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.4	Meningkatnya Kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.4.2	Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ
DEFINISI			
Program edukasi keselamatan yang bertujuan menanamkan kesadaran dan perilaku tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. SALUD merupakan upaya pembentukan safety culture sejak dini dengan sasaran anak usia PAUD–SD yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT			

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Propinsi Papua Barat	
DEFINISI				
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mencakup perumusan kebijakan, penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran di bidang transportasi darat. Ini termasuk perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana transportasi darat, serta sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdiri dalam 5 kegiatan yaitu:				
1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan;				
2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif;				
3. Penyusunan RKKL Pagu Anggaran;				
4. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi				
5. Reviu Renstra.				
SUMBER DATA				
• Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat				
• Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
IKK 4.1 = ∑ Realisasi Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Propinsi Papua Barat				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
5	5	4	4	4
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II				
Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM					
DUKUNGAN MANAJEMEN					
KEGIATAN					
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat		IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	
DEFINISI					
Kegiatan terkait dengan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (sumber: PM 85 Tahun 2020).					
SUMBER DATA					
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat - Sub Bagian Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.2 = ∑ Realisasi Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	85	85	85	85	85
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II					
Sub Bagian Tata Usaha					

PROGRAM					
DUKUNGAN MANAJEMEN					
KEGIATAN					
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (penyerapan anggaran)		
DEFINISI					
Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan kinerja tata kelola keuangan.					
SUMBER DATA					
• Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat • Sub Bagian Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.3 = ∑ Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (penyerapan anggaran)					
SATUAN					
%					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	98	98	98	98	98
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sub Bagian Tata Usaha					

PROGRAM					
DUKUNGAN MANAJEMEN					
KEGIATAN					
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)		
DEFINISI					
Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja pengelolaan Aset dan BMN					
SUMBER DATA					
• Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat • Sub Bagian Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.4 = $\sum$ Realisasin Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) selama satu Tahun Anggaran					
SATUAN					
%					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	100	100	100	100	100
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sub Bagian Tata Usaha					

PROGRAM					
DUKUNGAN MANAJEMEN					
KEGIATAN					
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)		
DEFINISI					
Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP BPK karena menjadi pertimbangan opini Laporan Keuangan, dan entitas wajib menindaklanjuti dalam 60 hari setelah LHP diterima. Prosentase dihitung dari jumlah Rekomendasi BPK yang telah di tindaklanjuti (Status Proses) dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima.					
SUMBER DATA					
• Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat • Sub Bagian Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.5 = $\sum$ Realisasin Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)					
SATUAN					
%					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	100	100	100	100	100
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II					
Sub Bagian Tata Usaha					

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	
DEFINISI				
Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kearsipan dan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat digitalisasi arsip di suatu instansi, maka tantangan pengawasan kearsipan juga semakin kompleks, Capaian kegiatan tingkat digitalisasi arsip dihitung dengan Pengawasan Kearsipan Internal, Sosialisasi Kearsipan				
SUMBER DATA				
• Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat • Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
IKK 4.6 = ∑ Realisasin Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM					
DUKUNGAN MANAJEMEN					
KEGIATAN					
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)		
DEFINISI					
Ukuran keberhasilan sebuah instansi dalam menyelesaikan dan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi publik yang masuk melalui sistem LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi hak warga negara, dan melakukan perbaikan berkelanjutan, menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pelayanan publik nasional.					
SUMBER DATA					
• Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat • Sub Bagian Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.7 = $\sum$ Realisasin Jumlah Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang di tindak lanjuti selama satu Tahun Anggaran					
SATUAN					
%					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	100	100	100	100	100
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sub Bagian Tata Usaha					

PROGRAM						
DUKUNGAN MANAJEMEN						
KEGIATAN						
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT						
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat			
DEFINISI						
Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat adalah Standar penilaian terukur yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)						
SUMBER DATA						
• Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat • Sub Bagian Tata Usaha						
CARA MENGHITUNG						
IKK 4.8 = $\sum$ Realisasin Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat						
SATUAN						
Kegiatan						
TARGET						
	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	1	1	1	1	
PENANGGUNG JAWAB						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sub Bagian Tata Usaha						

PROGRAM					
DUKUNGAN MANAJEMEN					
KEGIATAN					
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat		
DEFINISI					
Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat adalah Ukuran terukur yang menunjukkan sejauh mana suatu unit kerja berhasil membangun komitmen anti-korupsi dan pelayanan prima, melalui perbaikan di enam area perubahan utama: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang berujung pada predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan.					
SUMBER DATA					
• Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat • Sub Bagian Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.9 = $\sum$ Realisasin nilai LKE Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat					
SATUAN					
Nilai					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	80	80	80	80	80
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sub Bagian Tata Usaha					

PROGRAM													
DUKUNGAN MANAJEMEN													
KEGIATAN													
PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT													
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN											
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat										
DEFINISI alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kepuasan publik terhadap layanan transportasi, meliputi aspek seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, hingga sarana prasarana. Hasil IKM menunjukkan seberapa baik pelayanan transportasi telah memenuhi harapan masyarakat, menjadi dasar perbaikan kinerja dan evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien													
SUMBER DATA • Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat • Sub Bagian Tata Usaha													
CARA MENGHITUNG IKK 4.10 = $\sum$ Realisasin jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat selama satu Tahun Anggaran													
SATUAN Kegiatan													
TARGET <table border="1"> <tr> <td>2025</td> <td>2026</td> <td>2027</td> <td>2028</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>				2025	2026	2027	2028	2029	4	4	4	4	4
2025	2026	2027	2028	2029									
4	4	4	4	4									
PENANGGUNG JAWAB Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sub Bagian Tata Usaha													



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat

EDY PURWANTO
NIP. 19841217 200912 1 002